

POLITIK PENGETAHUAN, PENDIDIKAN PRIBUMI DAN PENYEDIAN BUKU PELAJARAN SEKOLAH: PENDIRIAN DAN PERKEMBANGAN DEPOT VAN LEERMIDDELEN DI HINDIA BELANDA (1878–1898)

Purwanto Putra^{1*}

¹ Program Studi D3 Perpustakaan, FISIP, Universitas Lampung

*Korrespondensi: purwanto.putra@fisip.unila.ac.id

Abstract

This article analyzes the background of establishment, institutional development, and the dynamics of knowledge politics related to the Depot van Leermiddelen as a provider of learning materials in the Dutch East Indies (1878–1898). In essence, the Depot van Leermiddelen functioned as a warehouse and as a distributor of books for the needs of indigenous education, with a brief discussion of its connection to the Kantoor voor de Volkslectuur and Balai Pustaka. Using the historical method, which includes the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, this study examines various primary sources such as the 1878 Staatsblad, the Regeerings-Almanak, depot catalogues, reports in the colonial press, as well as scholarly works on book history and colonial education. The findings indicate that the establishment of the depot was part of a broader colonial strategy to control the circulation of knowledge and to standardize instructional materials for indigenous schools. In the 1890s, the depot not only served as an upstream administrative node in the education system, but also entered the book market, not merely selling schoolbooks but also facilitating the sale of other books, maps, atlases, and printed materials as an agent for indigenous schoolbooks. At one point, a discount case involving the Atlas Nederlandsch-Indië generated friction between the depot and private booksellers. The 1898 Catalogus Depot subsequently underscored efforts toward standardization and the restriction of distribution to government schools. This study concludes that the period 1878–1898 constituted an early, highly state-centered phase in the formation of the learning-material provisioning system, and demonstrates how colonial education policies shaped the structure of knowledge and influenced the development of the modern Indonesian education system.

Keywords: Depot van Leermiddelen; colonial education; book history; Dutch East Indies; learning materials; knowledge politics; colonialism

Abstrak

Artikel ini menganalisis latar belakang pendirian, perkembangan kelembagaan, serta dinamika politik pengetahuan terkait Depot van Leermiddelen sebagai lembaga penyedia bahan ajar pada masa Hindia Belanda (1878–1898). Intinya Depot van Leermiddelen berfungsi sebagai gudang dan menjual buku-buku untuk kebutuhan pendidikan pribumi. Kemudian sedikit menyinggung keterkaitannya dengan Kantoor voor de Volkslectuur dan Balai Pustaka. Menggunakan metode historis yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini memeriksa berbagai sumber primer seperti Staatsblad 1878, Regeerings-Almanak, katalog depot, pemberitaan surat kabar kolonial, serta kajian akademik tentang sejarah perbukuan dan pendidikan kolonial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendirian depot merupakan bagian dari strategi kolonial untuk mengontrol aliran pengetahuan dan menstandarkan bahan pelajaran bagi sekolah pribumi. Pada dekade 1890-an, depot tidak hanya berfungsi sebagai simpul hulu administrasi pendidikan, tetapi juga masuk ke ranah pasar buku, bukan hanya sebatas menjual buku tetapi juga memfasilitasi penjualan buku-buku lain, peta, atlas dan bahan cetakan lainnya, sebagai agen buku sekolah pribumi. Pernah pula melalui kasus rabat Atlas Nederlandsch-Indië, memunculkan friksi antara Depot dengan pedagang buku swasta. Catalogus Depot 1898 kemudian menegaskan upaya standardisasi dan pembatasan distribusi pada sekolah pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa periode 1878–1898 merupakan fase awal terbentuknya sistem penyediaan bahan ajar yang sangat berpusat pada negara (*state-centered*), dan menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan kolonial membentuk struktur pengetahuan serta memengaruhi perkembangan sistem pendidikan Indonesia modern.

Kata Kunci: Depot van Leermiddelen; pendidikan kolonial; sejarah buku; Hindia Belanda; bahan ajar; politik pengetahuan; kolonialisme.

PENDAHULUAN

Pendidikan saat ini semakin dimudahkan dengan akses yang luas dan berlimpah terhadap informasi dan pengetahuan, termasuk sumber dan media pembelajaran (Oktaria et al., 2023). Bahkan

perkembangan Artificial Intelligence (AI) belakangan ini telah berperan yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Bahkan lebih spesifik lagi penguasaan kecakapan literasi informasi dan literasi digital, sebagaimana yang disampaikan Anthonysamy, Sivakumar, dan Pravina (2022) mengungkap kemampuan literasi digital dapat mengurangi misinformasi dan bahkan berdampak positif dalam mitigasi misinformasi (Anthonysamy & Sivakumar, 2024). Keterampilan literasi digital diperlukan sebagai jawaban atas tantangan perubahan perilaku informasi (Purwanto Putra, 2022).

Informasi dan pengetahuan merupakan fondasi yang tak tergantikan bagi keberlangsungan institusi, lembaga, bahkan negara, termasuk dalam menjaga eksistensi suatu bangsa. Oleh karena itu, meskipun pendidikan pada era sekarang ditopang oleh kelimpahan informasi, kemampuan menggabungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya (Putra et al., 2025), teknologi digital, dan kecerdasan buatan yang mempercepat akses serta pengolahan pengetahuan, kondisi ini tentu sangat berbeda dengan situasi pada masa lalu. Pada periode kolonial, ketersediaan bahan ajar tidak hanya terbatas, tetapi juga tidak merata. Sumber pembelajaran bergantung pada kemampuan lokal, inisiatif pribadi guru, atau jaringan perdagangan buku yang terbatas.

Memasuki awal abad-20 infrastruktur pendidikan pribumi ketika itu sudah ada, tapi masih dalam tahap awal pembentukan. Kebijakan Politik Etis Belanda meningkatkan akses pendidikan bagi pribumi, namun akses ini lebih banyak dinikmati kalangan elite, sehingga masih banyak kesenjangan (Marpaung et al., 2024). Pada banyak tempat proses belajar-mengajar kerap berlangsung tanpa standar materi, tanpa buku yang seragam, dan tanpa dukungan kurikulum yang terstruktur. Dengan demikian, persoalan utama pendidikan masa lalu bukan terletak pada bagaimana mengelola ‘banjir informasi’ seperti hari ini, melainkan bagaimana menyediakan dan meratakan penyebaran bahan ajar dasar agar proses pendidikan dapat berlangsung secara konsisten.

Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa setiap periode sejarah memiliki tantangan literasi dan pendidikan yang berbeda. Jika kini literasi digital dan literasi informasi berfungsi melindungi peserta didik dari hoaks, misinformasi, dan manipulasi data, maka pada abad ke-19 tantangannya adalah kekurangan informasi serta ketiadaan mekanisme distribusi pengetahuan yang terorganisasi. Di sinilah negara kolonial melihat perlunya menciptakan sistem yang mampu mengatur pasokan, distribusi, dan standarisasi bahan pelajaran bagi sekolah-sekolah pribumi. Kebijakan pendidikan pada masa tersebut mulai diarahkan untuk mendukung perluasan sekolah rakyat (*volkschool*) dan pendidikan dasar, sehingga kebutuhan akan buku ajar meningkat seiring ekspansi lembaga pendidikan.

Dalam konteks itulah, pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan kebijakan penting melalui Staatsblad No. 32 Tahun 1878, yaitu pendirian *Depot van Leermiddelen*, sebuah lembaga resmi yang berfungsi sebagai pusat penyediaan dan distribusi buku pelajaran. Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 16 Januari 1878 No. 11 tersebut menandai perubahan paradigma bahwa pendidikan pribumi tidak lagi dikelola secara sporadis, tetapi diarahkan menjadi bagian dari sistem administratif yang modern, terpusat, dan terstandarisasi. Dengan berdirinya depot ini, pemerintah kolonial berusaha menjawab

berbagai masalah fundamental pendidikan masa itu—kekurangan buku, ketidakseragaman materi, serta kebutuhan akan kontrol administratif terhadap aliran pengetahuan di kalangan pribumi.

Lalu, jika dianalisis secara kritis pendirian *Depot van Leermiddelen* pada 1878 tidak dapat dilepaskan dari strategi lebih luas pemerintah kolonial dalam membentuk, mengatur, dan mengendalikan pendidikan pribumi, sebagaimana juga terlihat dalam pendirian *Kweekschool Fort de Kock* yang, menurut temuan Putra dkk, bertujuan melatih guru pribumi yang loyal kepada pemerintah kolonial (Putra et al., 2024). Misalnya, jika *Kweekschool* berfungsi mencetak pendidik yang sesuai dengan orientasi politik kolonial, maka akan sangat masuk akal bahwa *Depot van Leermiddelen* bertugas memastikan pasokan buku dan bahan ajar yang terstandar sehingga proses pembelajaran berjalan dalam kerangka wacana yang dikontrol negara. Dengan demikian, kedua institusi ini merupakan bagian dari arsitektur kekuasaan yang membentuk identitas pendidikan pribumi melalui mekanisme pedagogis dan kebijakan pengetahuan yang saling melengkapi. Pemahaman atas keterkaitan historis ini penting untuk menilai warisan pendidikan kolonial dan dampaknya terhadap perkembangan sistem pendidikan serta identitas budaya masyarakat Indonesia.

Dalam urusan Pendidikan, khususnya terkait pengajaran bahasa Belanda untuk masyarakat Bumiputera. Pernah dilakukan perubahan dan reorganisasi peraturan, seperti beberapa perubahan yang dilakukan terhadap *Staatsblad* Kerajaan 28 September 1892 No. 14 (*Staatsblad* Hindia Belanda 1893 No. 126), khususnya terkait dengan rencana pengenalan bahasa Belanda di sekolah-sekolah bumiputra kelas I serta perluasan korps pejabat pengawas pendidikan bumiputra. Perubahan-perubahan tersebut ditetapkan melalui *Staatsblad* Kerajaan 1 Februari 1907 No. 45 (*Staatsblad* Hindia Belanda No. 210) dan 1 Februari 1907 No. 46. Dengan keputusan pertama yang disebut itu, *Staatsblad* Kerajaan tahun 1892 juga diubah dalam arti bahwa kewenangan untuk membuka sekolah bumiputra negeri untuk pendidikan rendah yang semula ada di bawah koordinasi Gubernur Jenderal kemudian dialihkan kepada Direktur Pengajaran, Ibadah, dan Niaga (*Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*), yang nantinya juga akan membawahi *Depot van Leermiddelen*. Hal ini sekaligus mempertegas peran *Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid* dan *Depot van Leermiddelen* dalam urusan pendidikan di Hindia Belanda

Permasalahan dan tujuan dari penulisan artikel ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana proses historis pendirian *Depot van Leermiddelen* pada tahun 1878, yang menjadi tonggak awal penyediaan bahan ajar terstandar bagi pendidikan pribumi di Hindia Belanda. Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab adalah Bagaimana konteks sosial-politik, kebutuhan pendidikan, dan dinamika administrasi kolonial mendorong lahirnya kebijakan pendirian depot tersebut? Lebih jauh, artikel ini mempertanyakan bagaimana mekanisme birokrasi, pengaturan kelembagaan, serta praktik distribusi buku dan bahan pelajaran dijalankan oleh pemerintah kolonial, serta dalam sejauh mana pendirian lembaga ini dapat dipandang sebagai cikal bakal sistem penyediaan sumber belajar di Indonesia saat ini. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelusuri akar historis penyediaan bahan ajar dan menganalisis kontribusi depot tersebut terhadap transformasi awal sistem pendidikan di wilayah Nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis, yaitu suatu prosedur ilmiah yang berfokus pada penelusuran, verifikasi, analisis, dan interpretasi data masa lalu untuk memahami perkembangan suatu institusi atau kebijakan dalam lintasan waktu (Gottschalk, 1985; Sjamsuddin, 2007). Metode historis mencakup empat tahap: heuristik, kritik eksternal dan internal, interpretasi, serta historiografi. Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan mengenai *Depot van Leermiddelen*, termasuk *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1878, *Regeerings-Almanak*, *Catalogus Depot* 1898, laporan pemerintah, surat kabar kolonial, serta kajian akademik mengenai sejarah perbukuan dan pendidikan kolonial.

Tahap kritik eksternal dan internal digunakan untuk menilai keaslian, kredibilitas, dan reliabilitas setiap sumber. Hal ini mencakup evaluasi autentisitas dokumen administratif kolonial, akurasi data jabatan dan struktur kelembagaan, serta objektivitas pemberitaan surat kabar mengenai praktik penjualan buku oleh pemerintah. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan melalui pembacaan mendalam untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarperistiwa, seperti motif kolonial di balik pendirian depot, politik standardisasi bahan ajar, serta ketegangan antara pemerintah dan pedagang buku dalam kasus rabat *Atlas Nederlandsch-Indië* sekitar 1895.

Tahap terakhir, historiografi, digunakan untuk menyusun narasi ilmiah yang sistematis dan argumentatif mengenai peran *Depot van Leermiddelen* dalam membentuk sistem penyediaan bahan ajar pada masa kolonial. Melalui tahapan ini, penelitian mampu menunjukkan bahwa depot tidak hanya berfungsi sebagai gudang logistik pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan kolonial dalam mengendalikan aliran pengetahuan, harga buku, dan standar materi pelajaran. Dengan demikian, metode historis memungkinkan peneliti mengungkap konteks, dinamika, dan implikasi kebijakan pendidikan kolonial terhadap perkembangan sistem pendidikan Indonesia modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendirian Depot van Leermiddelen dan Konteks Historis Tahun 1878

Konsep Pendirian Depot van Leermiddelen sebagaimana ditetapkan dalam *Staatsblad Hindia Belanda* No. 32 Tahun 1878 merupakan tonggak penting dalam kebijakan pendidikan kolonial terhadap masyarakat pribumi. Dari sini kita mengetahui lebih detail, bahwa pendirian depot ini berperan signifikan menjadi cikal bakal, semacam instrumen ‘perangkat’ yang telah disiapkan Pemerintah kolonial Hindia Belanda, sebelum nanti menjadi lebih umum saat diberlakukannya Kebijakan Politik Etis tahun 1905. Melalui keputusan Gubernur Jenderal tanggal 16 Januari 1878 No. 11, pemerintah kolonial menetapkan berdirinya sebuah lembaga resmi yang bertugas mengelola peredaran buku dan bahan pelajaran bagi sekolah-sekolah pribumi. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan bahan ajar di berbagai sekolah yang sebelumnya sering mengalami kekurangan sumber belajar, ketidakseragaman buku, dan ketergantungan pada guru atau penguasa lokal untuk penyediaan bahan pelajaran.

Pada aspek kelembagaan, depot yang ditempatkan secara langsung di bawah Departemen

Pengajaran, Ibadah, dan Niaga (*Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*), menunjukkan bahwa pemerintah kolonial mulai menata pendidikan pribumi sebagai urusan administrasi modern yang membutuhkan sistem distribusi pengetahuan yang terpusat dan terstandarisasi. Pada pasal 2 dan pasal 3, STAATSBLAD HINDIA BELANDA No. 32. Pendirian Depot van Leermiddelen, sebagai Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 16 Januari 1878 No. 11 secara eksplisit disebutkan bahwa pengangkatan seorang administrator dengan gaji yang relatif besar—antara *f* 300 hingga *f* 400 gulden per bulan—menggambarkan posisi strategis jabatan tersebut dalam struktur birokrasi kolonial. Beban tugas administrator meliputi bukan hanya pengelolaan logistik buku, tetapi juga akuntabilitas keuangan, tercermin dari kewajiban menyetorkan uang jaminan (*borgtocht*) sebesar *f* 300 gulden. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip administrasi keuangan kolonial yang sangat ketat dan berorientasi pada kontrol.

Di samping administrator, depot juga didukung oleh seorang pegawai dengan gaji *f* 12 gulden per bulan, yang menunjukkan struktur organisasi minimalis namun fungsional. Pengorganisasian yang relatif sederhana ini menandakan bahwa depot berfungsi sebagai pusat distribusi, bukan sebagai institusi produksi pengetahuan. Buku-buku yang dikelola sebagian besar merupakan karya yang diterbitkan oleh Landsdrukkerij atau penerbit kolonial di Belanda, sehingga depot menjadi simpul penting dalam arus masuk pengetahuan dari negeri induk menuju sekolah-sekolah pribumi di Hindia Belanda.

Keputusan ini sekaligus menggambarkan politik pengetahuan kolonial, yakni upaya menciptakan sistem pendidikan yang terkendali melalui penyediaan *leermiddelen* yang seragam agar pembelajaran di sekolah pribumi berlangsung sesuai garis kebijakan pemerintah. Melalui depot, pemerintah dapat menentukan buku mana yang layak diedarkan dan bagaimana akses terhadapnya diatur. Dengan demikian, pendirian depot merupakan strategi untuk mengatur produksi, peredaran, dan konsumsi bahan ajar dalam kerangka pendidikan kolonial.

Penerbitan Staatsblad ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 1870-an, pemerintah kolonial semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi stabilitas administrasi di wilayah jajahan. Kehadiran depot menjadi bagian dari proses modernisasi birokrasi pendidikan, sekaligus mencerminkan intensifikasi intervensi negara terhadap kehidupan intelektual kaum pribumi. Dalam konteks sejarah pendidikan Indonesia, keputusan ini dapat dipandang sebagai salah satu fase awal institusionalisasi manajemen buku sekolah yang kemudian hari berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks pada dekade-dekade berikutnya.

Keberadaan tanda tangan Sekretaris Jenderal Sprenger van Eijk dalam dokumen tersebut memperkuat status legal dan administratif kebijakan ini sebagai instrumen hukum kolonial. Pengumuman resmi pada 20 Januari 1878 menandai dimulainya operasional depot, yang kelak memainkan peran signifikan dalam produksi literasi, kontrol pengetahuan, dan penyebaran ide-ide kolonial dalam masyarakat pribumi. Pembahasan terhadap regulasi ini penting tidak hanya sebagai kajian sejarah pendidikan, tetapi juga sebagai bahan refleksi tentang bagaimana kebijakan informasi dan bahan ajar dibentuk dan dikelola dalam konteks kekuasaan kolonial.

Perlu diketahui pula bahwa artikel ini dibatasi pada tahun 1898, karena setelahnya ketika memasuki

fase awal pembentukan penerbit pemerintah (*Kantoor voor de Volkslectuur*) atau yang kemudian nantinya berkembang menjadi Balai Pustaka, pada masa awal berkerja sama dengan depot khususnya untuk aktivitas penyimpanan dan penjualan buku yang memang kerap didelegasikan ke *Depot van Leermiddelen* sebagai saluran distribusi resmi. Seiring waktu Balai Pustaka mengembangkan kanal penjualan sendiri melalui agen, kios, bus keliling sehingga pada perkembangannya ketergantungan terhadap *Depot van Leermiddelen* juga berubah (Drewes, 1960, hlm. 433). Kadang-kadang mereka bahkan mengetuk pintu rumah orang dan bernyanyi tentang buku-buku yang mereka bawa dalam bahasa Jawa (Teeuw, 1979, hlm. 123). Mobil-mobil keliling tersebut sangat berkontribusi dalam memopulerkan nama Balai Pustaka, karena memungkinkan akses ke tempat-tempat yang tidak dijangkau atau tidak dilayani oleh agen-agen biasa (Drewes, 1960, hlm. 433).

Sebagaimana yang diterangkan Kuitert (2021), berbagai buku-buku tersebut pada awalnya memang dijual melalui *Depot van Leermiddelen*, yaitu tempat penjualan grosir milik pemerintah tempat sekolah-sekolah biasanya melakukan pemesanan. Pada laporan pemerintah kolonial tahun 1902 telah memperkirakan bahwa pendapatan dari penjualan buku-buku pelajaran untuk pribumi itu akan mencapai f 10.000. Namun, karena penjualan dilakukan melalui Depot van Leermiddelen, pemerintah tidak perlu membayar biaya penagihan atau komisi penjualan (*collecteloon*) kepada pihak ketiga, misalnya pedagang buku atau agen. Oleh karena itu, dari seluruh transaksi tersebut, pemerintah hanya menghitung 10% dari f 200 sebagai biaya administrasi minimal, bukan 10% dari f 10.000, karena sebagian besar penjualan langsung ditangani oleh depot tanpa komisi. Karena depot menjual langsung dan tidak memakai jasa agen, biaya komisinya sangat kecil, sehingga pemerintah lebih banyak menerima pendapatan bersih dari penjualan buku (Nederlandsch-Indië, 1902).

Pada tahun 1907 pernah dikeluarkan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 27 Mei 1907 No. 7 yang ditetapkan dalam pengumuman pada *Javasche Courant* sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Pertambangan Hindia (Indische Mijnwet) dan ordonansi tanggal 12 Oktober 1906, yang mewajibkan untuk muat dalam ekstra-lampiran khusus surat kabar tersebut, yang mempunyai nomor urut tersendiri dan surat kabar tersebut dapat dibeli oleh masyarakat dengan membayar di Depot van Leermiddelen di Weltevreden. Sejak tahun 1919, barulah distribusi buku dilakukan melalui agen-agen penjualan yang dikenal sebagai pemegang sub-depot, atau langsung oleh kantor penerbitan itu sendiri. Jika melihat daftar nama yang tersedia, para agen penjualan tersebut tampaknya adalah orang pribumi dan, dalam beberapa kasus, mereka juga sekaligus menjalankan perusahaan percetakan atau usaha lain di luar tugas mereka sebagai pemegang depot, sebab dari pekerjaan sebagai pengelola sub-depot mereka hanya memperoleh penghasilan sebesar 10 gulden per tahun (Java Bode, 1884).

2. Konsolidasi Kelembagaan dan Praktik Operasional Depot van Leermiddelen (1878–1887)

Pendirian Depot van Leermiddelen yang dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 32 Tahun 1878 menandai pergeseran penting dari sekadar pengadaan buku sekolah secara *ad-hoc* menuju pembentukan simpul hulu yang permanen bagi produksi, penyimpanan, dan pasokan bahan pelajaran ke sekolah-sekolah pemerintah, khususnya untuk pendidikan pribumi (Staatsblad van Nederlandsch-Indië, 1878). Sejak awal, depot tidak dirancang sebagai lembaga sirkulasi publik layaknya toko buku atau perpustakaan umum, melainkan sebagai gudang pemerintah yang mengatur aliran buku-buku resmi dari

percetakan negara (*Landsdrukkerij*) menuju jaringan sekolah negeri. Orientasi operasionalnya bersifat administratif-logistik, menginventarisasi stok, memastikan ketersediaan judul-judul yang disahkan pemerintah, dan mengefisienkan distribusi ke lembaga pendidikan di berbagai wilayah jajahan, bukan mengembangkan pasar pembaca secara luas.

Secara kelembagaan, depot yang ditempatkan di bawah Departemen Pengajaran, Ibadah, dan Niaga (*Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*) yang secara politis memperlihatkan bagaimana negara kolonial memaknai pendidikan pribumi sebagai bagian dari instrumen tata kelola sosial, religius, dan ekonomi secara sekaligus. Penggabungan tiga ranah sekolah, lembaga keagamaan, dan aktivitas ekonomi dalam satu departemen menunjukkan bahwa penyediaan bahan ajar tidak berdiri netral, melainkan terkait erat dengan pengaturan moral (melalui kontrol wacana keagamaan) dan pengaturan tenaga kerja (melalui pendidikan dasar yang menunjang “kemampuan kerja” penduduk pribumi). Dalam kerangka ini, buku sekolah dan *leermiddelen* lain diperlakukan sebagai instrumen pemerintah untuk menanamkan disiplin bahasa, pengetahuan, dan perilaku kerja yang sesuai dengan kebutuhan administrasi kolonial.

Figur administrator depot menempati posisi kunci dalam desain kelembagaan tersebut. Dalam *Staatsblad* 1878 ditegaskan bahwa administrator diangkat dengan gaji awal f300 gulden per bulan, dengan kemungkinan kenaikan hingga f400 gulden, serta diwajibkan menyetor jaminan uang (*borgtocht*) sebesar f300 gulden sebagai bentuk tanggung jawab keuangan (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, 1878). Ketentuan ini menandakan bahwa pemerintah memandang pengelolaan depot bukan sekadar tugas *clerical*, tetapi fungsi strategis yang menyangkut pengelolaan aset negara dan kontrol atas aliran pengetahuan. Data dalam *Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië* menunjukkan bahwa pada Desember 1887 posisi Administrator Depot van Leermiddelen ini diisi oleh C. J. Brouwer, yang menandai fase konsolidasi personalia setelah hampir satu dekade beroperasi (*Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië*, 1887). Reposisi ini dapat dibaca sebagai upaya profesionalisasi, penguatan akuntabilitas, sekaligus penegasan kembali pentingnya depot dalam struktur birokrasi kolonial.

Dalam praktik sehari-hari, depot berfungsi sebagai penghubung antara *Landsdrukkerij* dan sekolah-sekolah negeri atau pribumi. Buku-buku yang dicetak atas biaya pemerintah—baik dalam bahasa Belanda maupun bahasa-bahasa setempat seperti Melayu dan Sunda—ditampung terlebih dahulu di gudang depot untuk kemudian dicatat, dikelompokkan berdasarkan jenis dan tujuan pemakaian, dan didistribusikan sesuai permintaan pejabat pendidikan daerah. Mulai dekade 1880-an, depot juga mengembangkan layanan pemesanan melalui surat dan menerbitkan katalog buku sekolah yang dapat dipesan, yang memperkuat fungsinya sebagai simpul administrasi distribusi skala koloni. Arsitektur ini menjadikan depot relatif efektif sebagai gudang dan pusat logistik pendidikan, namun tidak serta-merta menjadikannya saluran sirkulasi bacaan yang dinamis di luar lingkup sekolah pemerintah, karena akses dan pemilihan judul tetap dikontrol dari pusat.



Gambar 1. Katalog Buku Bahan Pelajaran untuk Sekolah Rendah Eropa di Hindia Belanda diterbitkan Depot van Leermiddelen, Tahun 1891

Secara spesifik belum ditemukan penjelasan apakah katalog ini ditujukan secara khusus untuk siswa ELS (*Europeesche Lagere School*) yang umumnya siswanya terdiri dari anak Eropa dan pribumi atau *Volksschool* (Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat) yang memang diisi anak pribumi di desa atau masyarakat luas. Pada intinya pada katalog tersebut memuat daftar buku-buku pelajaran, dengan pengecualian (termasuk juga) beberapa alat bantu pengajaran yang diperuntukkan untuk dijual (lihat antara lain No. 264 dan 326) diterbitkan oleh *Depot Bahan Pelajaran* di Weltevreden (Batavia) oleh percetakan negara yang dipublikasikan tahun 1891, dikirim ke berbagai wilayah melalui wesel pos, dengan biaya minimum 10 gulden (*Depot van Leermiddelen*, 1891).

Sesuatu yang cukup mengguncang terjadi pada tahun 1917, ketika itu Rinkes sebagai pimpinan di Balai Pustaka mengajukan sebuah daftar tuntutan, untuk kepentingan lembaganya antara lain, ia menyatakan bahwa selain peningkatan kapasitas teknis, jumlah pegawai harus ditambah, dan hal yang terkait secara langsung bahwa distribusi buku-buku tidak lagi boleh diserahkan kepada *Depot van Leermiddelen*. Bahkan, tuntutan terakhir ini diberi tanda sebagai sesuatu yang mendesak. Digambarkan bahwa dengan penuh kecemasan, Rinkes mencatat bahwa teks-teks yang masuk ke depot seolah-olah tidak pernah keluar lagi. Hal itu terjadi, misalnya, pada sebuah judul yang dicetak tahun 1875 dengan

tiras 10.000 eksemplar; pada tahun 1912 masih tersisa 9.980 eksemplar tersimpan di gudang depot (Jedamski, 1992).

Dalam surat tertanggal 8 Maret 1901 No. 8008, memang sempat disebutkan oleh direktur depot bahwa jumlah atau persediaan buku, penentuan jumlah eksemplar yang harus dicetak dari suatu karya yang akan diterbitkan atas biaya negara kadang-kadang memang tidak tepat atau meleset; menurut pandangannya hal itu tidak dapat dihindari, meskipun sedapat mungkin diusahakan pencegahannya. Selain itu, taksiran tersebut, misalnya dalam hal cetak ulang berbagai peraturan, ternyata menjadi keliru apabila peraturan-peraturan itu kemudian dicabut atau diubah dan, akibatnya, hasil cetak ulang itu menjadi nyaris tidak berguna dan tidak dapat dijual (Algemeene Rekenkamer, 1901). Sebagaimana juga di perpustakaan, betapa berharga dan bernilainya informasi, koleksi yang dimiliki perpustakaan menjadi tidak bermanfaat bagi pemustaka jika tidak dapat diakses atau tidak dapat ditemukan kembali (Putra, 2019).

Buku-buku pelajaran menjadi mubazir dan tak pernah dipakai. Sebuah laporan yang mengulas tentang Zending (misi zending) di wilayah *Simeloengoen* (Simalungun) yang dalam pengajaran di sekolah Bumiputera memiliki pemahaman menggunakan bahasa Simeloengoen atau bahasa Batak Timur sebagai bahasa pengantar. Pemahaman ini kemudian mendorong guru-zending Ed. Muller untuk menulis buku-buku baca dan hitung dalam bahasa Simeloengoen. Pada tahun 1913, zendeling ini sudah menulis dua buku baca Simeloengoen dan pada tahun 1916 dua buku hitung, semuanya ketika itu dicetak dengan biaya pemerintah. Namun, buku-buku tersebut tidak pernah dipakai di sekolah-sekolah rakyat. Mengapa buku-buku itu tidak pernah diminta oleh para pengelola sekolah, tidak diketahui.

Menurut peraturan yang berlaku pada waktu itu, memang pengajaran wajib diberikan dengan menggunakan bahasa daerah (*landstaal*) sebagai bahasa pengantar. Jika bahasa daerah dianggap tidak cocok, barulah bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa pengantar. Lalu, buku-buku yang telah terkumpul pada tahun 1928, dicoret dari katalog Depot van Leermiddelen, alasannya karena buku-buku itu tidak pernah diminta dan tampaknya memang tidak ada kebutuhan terhadapnya. Kembali lagi buku-buku yang sudah dicetak menjadi tidak berguna (“*Nooit Gebruikte Schoolboekjes! (Buku-Buku Pelajaran Yang Tak Pernah Dipakai)*,” 1935).

Seperti disebutkan dalam paragraf 18 Laporan Algemene Rekenkamer tahun 1919, memang ditemukan ada masalah dalam urusan pencatatan stok atau persediaan di Depot. Maka dari itu telah direncanakan untuk meninjau kembali kemungkinan penyederhanaan sistem pencatatan persediaan di Depot van Leermiddelen. Setelah pernyataan tersebut, Kamber beberapa kali mengingatkan kembali Direktur Pengajaran, Ibadah, dan Niaga (*Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*) mengenai pentingnya peninjauan ini. Kemudian, melalui surat tertanggal 28 September 1920 No. 34520/IIA, direktur menyampaikan persetujuannya terhadap pandangan administrator depot yang dilampirkan dalam surat tersebut. Menurut administrator, penyederhanaan sistem pencatatan belum dapat diterapkan karena persediaan dalam jumlah besar masih harus disimpan di gedung-gedung yang letaknya saling berjauhan, sehingga pengawasannya menjadi sangat sulit.

Selain itu, karena pada prinsipnya pemerintah telah memutuskan untuk membangun sebuah depot baru, dianggap lebih tepat untuk menunggu hingga gedung baru tersebut selesai. Dengan demikian,

administrasi dapat diatur dengan pola kerja yang lebih modern dan komersial, di mana sistem pencatatan yang disederhanakan akan secara otomatis dapat diterapkan. Bahkan pernah pula dilaporkan ruang penyimpanan yang tersedia di Depot van Leermiddelen pernah dialihkan untuk mengatasi kekurangan fasilitas penyimpanan pada lembaga Grondpeilwezen (Lembaga Pengukuran Tanah). Langkah ini diambil karena lokasi ruang Depot tersebut berdekatan —berlokasi tepat di seberang gudang Grondpeilwezen, sehingga memungkinkan pemanfaatan yang lebih efisien dan mendukung kelancaran operasional lembaga tersebut. Hal itu dilakukan karena perbaikan ruang yang dilakukan Depot van Leermiddelen pada bulan September dan dikonfirmasi akan kosong dan dapat digunakan mulai 1 November 1937. Dengan demikian, Depot van Leermiddelen bukan hanya menyediakan layanan bahan ajar, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai simpul logistik bagi instansi teknis lain pada masa itu (Algemeene Rekenkamer, 1937).

Pada sisi yang lain terkait upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menarik perhatian publik untuk membeli berbagai buku dan terbitan yang tersedia di Depot van Leermiddelen, direktur juga menyatakan bahwa dilakukan promosi dengan menerbitkan katalog-katalog yang disebarluaskan ke seluruh Hindia Belanda. Cara-cara yang dilakukan adalah dengan mengirimkan kepada semua pengusaha toko buku, para inspektur dan inspektur adjun pendidikan bumiputra, komisi-komisi sekolah bumiputra, para kepala sekolah bumiputra, kepada pemesan buku yang dianggap belum memilikinya, dan kepada setiap orang yang memintanya.

Kendati demikian tetap ada banyak keterbatasan, khususnya pada fase konsolidasi 1878–1887 terlihat dari tiga hal utama. Pertama, pilihan judul sangat ditentukan oleh pemerintah kolonial dan penerbit resmi, sehingga ruang bagi inisiatif lokal—baik guru maupun pedagang buku—untuk mempengaruhi daftar bahan ajar sangat sempit (Jedamski, 1992). Kedua, distribusi difokuskan pada lembaga pendidikan milik pemerintah; sekolah swasta, lembaga keagamaan, atau komunitas pembaca di luar jaringan resmi tidak menjadi sasaran utama kebijakan depot, sehingga kesenjangan akses bacaan di luar sekolah tetap besar. Ketiga, belum terdapat kebijakan eksplisit yang sejak awal mendorong depot berperan sebagai pemasok buku bagi publik luas, sehingga interaksinya dengan ekosistem pasar buku dan pedagang swasta masih terbatas dan cenderung bersifat satu arah. Dalam kaitannya dengan rumusan masalah penelitian, fase konsolidasi ini memperlihatkan bahwa “penyediaan bahan ajar” pada periode awal Depot van Leermiddelen sangat berpusat pada negara (state-centered), dan baru secara bertahap memunculkan ketegangan dengan pasar buku ketika negara mulai masuk ke ranah harga dan distribusi langsung kepada masyarakat pada tahun-tahun sesudahnya.

3. Politik Harga dan Relasi Negara–Pedagang Buku

Depot van Leermiddelen tidak hanya menjual buku-buku pelajaran untuk pendidikan Bumiputra, siswa Eropa tetapi juga termasuk buku umum, peta, dan terbitan cetak lain, seperti atlas yang tidak secara khusus termasuk kategori bahan ajar tetapi disediakan untuk dijual di depot tersebut. Depot bertindak sebagai agen buku sekolah pribumi. Pernah ada keluhan yang ditulis oleh “B. Sinjo Jantje” dalam sebuah surat kabar pada pertengahan 1890-an menjadi salah satu dokumentasi awal tentang gesekan antara negara dan pedagang buku dalam ekosistem perbukuan Hindia Belanda. Dalam tulisannya, ia menyoroti “persoalan rabat (diskon)” yang tidak lazim dibandingkan praktik perbukuan di Eropa. Jika di negeri

Belanda para penerbit kerap mengeluhkan pedagang yang menjual di bawah harga resmi, maka di Hindia justru *Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*—melalui *Depot van Leermiddelen*—yang menjual buku di bawah harga eceran resmi (*particuliere prijs*) (“*Depot van Leermiddelen in Alle Indische Couranten Geannonceerd, Dat Uit Het Depot Verkrijgbaar Was*,” 1895).

Pernah diperoleh pendapatan dari penjualan buku pelajaran untuk bumiputra diperkirakan berjumlah f 16.000. Namun, karena sebagian besar buku dijual melalui Depot van Leermiddelen dan untuk itu tidak perlu dibayarkan biaya komisi, maka perhitungan hanya dilakukan sebesar 10 persen dari f 400 (*Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*, 1906). Peristiwa ini menggambarkan pertentangan awal antara negara sebagai penyedia bahan ajar dan pedagang buku swasta, menunjukkan bahwa penyediaan sumber belajar pada periode ini tidak hanya persoalan pendidikan, tetapi juga terkait relasi kuasa dalam pasar buku kolonial.

Praktik rabat negara ini menjadi kontroversial karena *Depot van Leermiddelen* mengumumkan melalui surat kabar bahwa *Atlas Nederlandsch-Indië* tersedia dengan harga f1,25 dan dikirim *franco per post*, sementara harga resmi yang ditetapkan penerbit besar di Belanda adalah f2,50. Dengan demikian, pemerintah menjual langsung kepada masyarakat dengan harga yang bahkan lebih rendah daripada harga yang harus dibayar pedagang buku untuk memperoleh atlas tersebut dari penerbitnya. Secara ekonomi, tindakan ini berpotensi merusak struktur biaya pedagang dan memaksa mereka menanggung kerugian bila mencoba bersaing dengan pemerintah—sebuah bentuk intervensi harga atau bahkan “dumping” dalam istilah pasar modern. Meski dikemas sebagai bagian dari layanan pendidikan, langkah ini memperlihatkan bagaimana negara kolonial memanfaatkan depot bukan hanya sebagai simpul hulu administrasi pendidikan, tetapi juga sebagai aktor yang mampu mengendalikan harga dan menekan pasar buku independen.

Setelah ratusan eksemplar atlas terjual, pemerintah kemudian mengeluarkan pengumuman korektif: atlas sekolah hanya boleh dijual kepada instansi pendidikan milik pemerintah berdasarkan keputusan Direktur Pengajaran, Ibadah, dan Niaga (*Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*). Namun koreksi tersebut bersifat *ex post facto*: kerugian para pedagang yang telah kehilangan pasar tidak dapat dipulihkan. Dalam tulisan “B. Sinjo Jantje,” juga muncul seruan agar dibentuk suatu “komisi pengawas” yang memantau penyimpangan dalam dunia perbukuan, karena langkah pemerintah dianggap menyalahgunakan posisinya sebagai regulator sekaligus kompetitor. Kritik ini menyingkap ketimpangan fundamental dalam relasi negara–swasta: ketika negara menguasai percetakan, distribusi, harga, dan akses publik, pedagang buku kehilangan ruang untuk berkompetisi secara adil.

Kasus atlas tersebut menunjukkan ambiguitas fungsi *Depot van Leermiddelen*. Sebagai lembaga yang sejak awal dibentuk untuk menopang pendidikan pribumi, depot semestinya menjalankan fungsi administratif-logistik yang netral. Namun pada praktiknya, depot berubah menjadi pemain dalam pasar ritel ketika menjual langsung kepada publik. Di satu sisi, diskon dan pengiriman gratis memperluas akses terhadap sumber pengetahuan geografis penting tentang Hindia Belanda, sehingga menguntungkan sekolah, guru, dan mungkin sebagian masyarakat. Tetapi di sisi lain, kebijakan tersebut mengabaikan keberlangsungan ekosistem pedagang lokal, memperkuat dominasi negara dalam rantai nilai buku sekolah, dan mengurangi ruang tumbuh bagi pasar buku domestik. Dalam kerangka politik pengetahuan

kolonial, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengatur isi buku yang beredar, tetapi juga mengendalikan mekanisme ekonomi di balik produksi dan distribusinya.

Pernah pula dimuat informasi, bukan hanya buku-buku yang ada di Depot dijual dengan harga lebih murah dari harga pedagang pengecer, tetapi bahkan pernah pula Depot membagikan koleksi buku-buku tersebut secara cuma-cuma atau gratis. Untuk kepentingan rencana percobaan penyelenggaraan pendidikan rakyat di Jawa dan Madura, yang diselenggarakan oleh *gemeente* (pemerintah kota) atau setingkat kotamadya dengan dukungan dari pemerintah pusat (bandingkan dengan memori penjelasan yang dikutip, hlm. 15/16), melalui Besluit Gubernur Tanggal 25 Januari 1907 No. 6 (Bijblad Staatsblad Hindia Belanda No. 6697) telah diberikan wewenang kepadanya untuk, demi kepentingan empat wilayah, menyediakan dana bagi pembangunan dan perlengkapan sekolah, pendidikan dan pemberian penghidupan bagi tenaga pengajar, pelaksanaan pengawasan terhadap pendidikan maupun keperluan lain yang berkaitan, serta untuk pemberian secara cuma-cuma bahan-bahan pelajaran dari Depot van Leermiddelen milik pemerintah di Weltevreden (Nederlandsch (Oost-)Indië., 1907).

Situasi menjelang pergantian abad tercermin dalam *Catalogus Depot* tahun 1898, yang menjadi dokumentasi resmi jenis judul yang dikelola depot setelah dua dekade beroperasi. Katalog tersebut memuat sekitar 52 judul dalam bahasa Melayu—didominasi buku baca permulaan, ejaan, berhitung, dan sebagian kecil terjemahan—yang sebagian besar diberi penanda “untuk sekolah pemerintah” (*Catalogus Depot*, 1898). Dari sisi administratif, katalog ini menunjukkan upaya standardisasi bahan ajar dan transparansi stok, sekaligus mempertegas bahwa sasaran utama depot tetap sekolah-sekolah pemerintah. Dengan demikian, kasus rabat atlas tampak sebagai anomali: depot tidak dimaksudkan sebagai lembaga yang melayani pasar umum, namun justru sempat terlibat dalam praktik penjualan langsung yang memicu ketegangan dengan pedagang buku.

Bila dilihat secara keseluruhan, periode 1878–1898 dapat dibaca sebagai fase awal penyediaan bahan ajar yang terdiri atas tiga lapis perkembangan. Pertama, fase *institusionalisasi* melalui *Staatsblad* 1878 yang mendirikan depot dan membentuk struktur birokrasi baru, lengkap dengan pengangkatan administrator seperti C. J. Brouwer pada 1887. Kedua, fase *konsolidasi operasional* di mana depot bekerja sebagai simpul hulu buku sekolah untuk jaringan pendidikan pemerintah. Ketiga, fase *friksi pasar* yang ditandai oleh kasus rabat atlas—menyingkap ketegangan antara negara dan pedagang buku—serta langkah *standardisasi awal* melalui *Catalogus Depot* 1898. Keseluruhan dinamika ini mengonfirmasi bahwa penyediaan bahan ajar di masa kolonial tidak pernah netral: ia lahir dalam tarikan antara kebutuhan administratif negara, pembentukan pengetahuan kolonial, dan keberadaan pasar buku yang harus berjuang menemukan ruang hidupnya dalam bayang-bayang dominasi negara.

Bahkan pernah pula dijelaskan dalam beberapa surat tentang biaya yang ditimbulkan saat pengiriman buku-buku tersebut dari depot. Barang-barang dari Landsdrukkerij dan dari Depot van Leermiddelen untuk keperluan pendidikan bumiputra di Weltevreden, yang harus diangkut ke tempat tujuan melalui perantara Koninklijke Paketvaartmaatschappij, dikirimkan dari kedua lembaga tersebut dengan kereta ke gudang umum di Batavia dan dari tempat penyimpanan ini, setelah terlebih dahulu dikemas dalam peti, biasanya diangkut dengan perahu (*prauw*) ke atas kapal milik perusahaan tersebut di Tandjong Priok.

Di Algemene Rekenkamer timbul pertanyaan apakah tidak mungkin dan tidak lebih murah jika barang-barang tersebut dikirim tanpa perantara gudang umum dan dengan demikian langsung dari lembaga-lembaga terkait ke atas kapal yang dimaksud di atas, dengan cara yang sama seperti, misalnya, pengiriman dari gudang daerah untuk pakaian dan perlengkapan di Batavia, yakni sebagian dengan memanfaatkan Staatsspoorweg (Kereta Api Negara) dan selebihnya ke atas kapal dengan bantuan seorang perantara, misalnya kontraktor untuk pemindahan barang dari gerbong kereta api negara ke kapal-kapal di Tandjong Priok.

Pada praktiknya pada tahun 1923 pernah dibayarkan biaya bea masuk dan ongkos pengangkutan perlengkapan sekolah dari pelabuhan labuh jangkar di Tandjong Priok ke gudang-gudang penyimpanan di kawasan kota bawah Batavia dalam jumlah yang lebih besar daripada yang semula dianggarkan. Lalu ditahun ini juga ada penambahan sementara pegawai Eropa pada Depot van Leermiddelen sehingga pengeluaran semakin meningkat (Nederlandsch-Indië, 1923).

Melalui surat tertanggal 20 Agustus 1902 No. 10588, setelah meminta kepada direktur Pengajaran, Ibadah, dan Niaga (*Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*) untuk mempertimbangkan agar dilakukan suatu penyelidikan terkait hal tersebut di atas, Kamer menerima surat balasan sang direktur tertanggal 9 Desember 1902 No. 21254, yang menyatakan bahwa sekalipun menurut perhitungan yang dilampirkan, pengiriman barang-barang dari Landsdrukkerij maupun dari Depot van Leermiddelen secara langsung, dengan cara seperti yang dimaksud oleh college, memang akan lebih murah daripada bila dilakukan melalui perantara kepala gudang umum, besarnya penghematan tetap sedemikian kecil sehingga menurut pendapat direktur, hal itu sendiri tidak merupakan alasan untuk mengubah cara pengiriman yang berlaku saat ini (Algemeene Rekenkamer, 1902).

Selain itu, menurut pandangan direktur, perubahan semacam itu justru akan menyebabkan peningkatan biaya yang tidak sebanding dengan penghematan yang diperoleh, karena pembuatan jumlah peti yang diperlukan akan menuntut pengangkutan lebih banyak tukang kayu dan untuk keperluan pengiriman dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sedangkan baik di Landsdrukkerij maupun di Depot van Leermiddelen tidak tersedia ruang untuk penyimpanan sementara peti-peti yang telah siap dikirim, sehingga harus dibangun tempat penyimpanan baru.

Sehubungan dengan itu semua, direktur berpendapat bahwa rencana pengiriman langsung barang-barang yang bersangkutan dari lembaga-lembaga tersebut ke kapal-kapal Koninklijke Paketvaartmaatschappij di Tandjong Priok sebaiknya dibatalkan. Dengan kesimpulan ini, Kamer dapat menyetujuinya berdasarkan alasan-alasan yang diajukan direktur, sebagaimana diberitahukan kepada kepala departemen yang bersangkutan melalui surat tertanggal 5 Maret 1903 No. 2781.

KESIMPULAN

Pembentukan *Depot van Leermiddelen* pada tahun 1878 menandai fase institusionalisasi awal penyediaan bahan ajar di Hindia Belanda. Sebagai simpul hulu dalam sistem pendidikan kolonial, depot ditempatkan di bawah Departemen *Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*, memperlihatkan bahwa penyediaan buku sekolah sejak awal tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan pedagogis, tetapi juga sebagai instrumen kontrol administratif, moral, dan ekonomi atas masyarakat pribumi. Fase konsolidasi

1878–1887 menunjukkan bagaimana depot beroperasi terutama sebagai gudang pemerintah yang menstandarkan aliran judul buku dari percetakan negara ke sekolah-sekolah negeri, dengan struktur kelembagaan yang ketat, akuntabilitas finansial yang tinggi, dan keterbatasan interaksi dengan pasar buku swasta. Pola ini menegaskan bahwa penyediaan bahan ajar pada masa kolonial sangat *state-centered*, mengutamakan efisiensi birokratis dan homogenisasi pengetahuan sesuai kepentingan kolonial.

Memasuki dekade 1890-an, dinamika penyediaan bahan ajar memperlihatkan ketegangan baru ketika *Depot van Leermiddelen* memasuki ranah ekonomi ritel melalui penjualan *Atlas Nederlandsch-Indië* dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga resmi penerbit. Kasus rabat ini memperlihatkan ambiguitas peran depot—di satu sisi meningkatkan akses terhadap sumber belajar, tetapi di sisi lain merugikan pedagang buku lokal dan memperkuat dominasi negara dalam struktur pasar. Koreksi kebijakan yang dilakukan pemerintah datang terlambat dan tidak menghapus kerugian yang telah terjadi. Ketegangan ini menunjukkan bahwa penyediaan bahan ajar pada masa kolonial tidak hanya menyangkut urusan logistik pendidikan, tetapi juga mencerminkan benturan antara logika kontrol negara dan dinamika ekonomi pasar.

Pada penghujung abad ke-19, diterbitkannya *Catalogus Depot* 1898 menandai upaya standarisasi dan transparansi bahan ajar yang memperkuat fungsi administratif depot, sekaligus mempertegas bahwa sasaran utamanya tetap sekolah pemerintah. Dalam perspektif historis, periode 1878–1898 memperlihatkan sebuah pola yang konsisten: institusionalisasi, konsolidasi, lalu munculnya friksi pasar. Rangkaian perkembangan ini membentuk fondasi awal sistem penyediaan bahan ajar di Indonesia, yang pada masa berikutnya berkembang menjadi jaringan distribusi pengetahuan yang lebih kompleks dan terpusat. Dengan demikian, *Depot van Leermiddelen* bukan hanya bagian dari sejarah pendidikan kolonial, tetapi juga cikal bakal tata kelola buku sekolah dan politik pengetahuan yang mewarnai perkembangan pendidikan modern di Indonesia.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Algemeene Rekenkamer. (1901). Verslag van de Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indië over het dienstjaar 1901, uitgebracht in voldoening aan het voorgeschrevene bij art (79 Der Comptabiliteitswet No. Staatsblad 1895, no. 225; p. 38). Landsdrukkerij.
- Algemeene Rekenkamer. (1902). Verslag van de Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indië over het dienstjaar 1902, uitgebracht in voldoening aan het voorgeschrevene bij art (). (79 Der Comptabiliteitswet No. Staatsblad 1895, no. 225). Landsdrukkerij.
- Algemeene Rekenkamer. (1937). Verslagen der Algemeene Rekenkamer in Nederland en in Nederlandsch-Indië over 1937 (No. Bijlagen, no. 458. Tweede Kamer.). Landsdrukkerij.
- Anthony, L., & Sivakumar, P. (2024). A new digital literacy framework to mitigate misinformation in social media infodemic. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 73(6/7), 809–827. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2022-0142>
- Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. (1906). *Nederlandsch-Indië. Begroting der Uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het Dienstjaar 1906. Hoofdstuk II: Uitgaven in Nederlandsch-Indië, Afdeeling V Uitgewerkte en Toelichtende Staat*. Landsdrukkerij.
- Depot van Leermiddelen. (1891). *Catalogue of the Depot of Teaching Materials in Weltevreden*. Landsdrukkerij.
- Depot van leermiddelen in alle Indische couranten geannonceerd, dat uit het depot verkrijgbaar was. (1895, October 18). *Newspaper for the Book Trade*, 62(84).

- Drewes, G. W. J. (1960). D. A. Rinkes: a note on his life and work. *Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde*, 117, 4, 417-35.
- Java-bode: news, trade and advertising magazine for the Dutch East Indies*. (1884, June 7). *Scapegoats of the public*. (No. 133, Year 33). Batavia: Tanning.
- Jedamski, D.. (1992). Balai Pustaka: A Colonial Wolf in Sheep's Clothing | Rinkes. <https://rinkes.nl/genealogie/douwe-adolf-rinkes/balai-pustaka-a-colonial-wolf-in-sheeps-clothing/>
- Kuitert, L. (2021). Balai Pustaka and the Politics of Knowledge. *Lembaran Sejarah*, 17(1), 2–17.
- Marpaung, A., Harifin, H., Zebua, I., & Sinaga, R. (2024). The Impact of the Ethical Policy on the Development of Education in Early 20th Century Indonesia. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 5(2), 208–214. <https://doi.org/10.34007/warisan.v5i2.2389>
- Nederlandsch (Oost-)Indië. (1907). *Nederlandsch-Indië. Koloniaal Verslag van 1907. Deel I: Grondgebied en Bevolking.* ' . Departement van Koloniën.
- Nederlandsch-Indië. (1902). *Begrooting der Uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het Dienstjaar 1902: Hoofdstuk II, Uitgaven in Nederlandsch-Indië, Afdeling V, Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. Uitgewerkte en Toelichtende Staat.* Landsdrukkerij.
- Nederlandsch-Indië. (1923). *Nadere Wijziging van de Begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1921.* Landsdrukkerij.
- Nooit gebruikte schoolboekjes! (Buku-buku pelajaran yang tak pernah dipakai). (1935, February 27). *Deli Courant: Dagblad Voor Sumatra.*, 11.
- Oktaria, R., Ali, I., & Putra, P. (2023). The Potential Utilizing ChatGPT for Education and Teaching Students: Understanding, Prospects, Challenges, and Utilization". *Educative: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 87–94. <https://doi.org/10.37985/educative.v1i2.75>
- Purwanto Putra. (2019). Information Seeking In Library: Study of The Thingking of Michel Foucault. *Jurnal Metakom*, 3(2).
- Purwanto Putra. (2022). Menyelamatkan dan Potensi Penyelamatan Ekonomi Pasca Covid-19. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi*. <https://doi.org/10.33830/ikomik.v2i1.2430>
- Purwanto Putra, Windah, A., & Purnamayanti, A. (2025). Information Literacy Capability of Preschool Teachers in An Effort To Improve The Pedagogical Competence of Preschool Teachers in Central Lampung District. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 7(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v7i1.1135>
- Putra, P., Hendrawan, M. R., Oktaria, R., & Gunawan, G. (2024). Sekolah Radja “Kweekschool Fort de Kock”: Exploring History and Role in Teacher Education in the Netherlands East-Indies. *Educative: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 31–40. <https://doi.org/10.37985/educative.v2i1.383>
- Teeuw, A. (1979). *Modern Indonesian Literature* vol. II. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- The Indian Newspaper*. (1925, June 10). *Atlas Protestant Church*. (No. 220, Year 4). Surabaya, Dutch East Indies.